

**MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
(TIM PRB PARIKESIT) DI DUSUN KALI TENGAH KIDUL DESA GLAGAHARJO
KECAMATAN CANGKRINGAN SLEMAN**

Oleh:
Yenny Dwi Artini

Abstract.

Indonesia was the country most prone to disasters and is one of the central locations mega disaster. This is because Indonesia is geologically located at the fire ring groove. Understanding of the ring of fire is in the process of the movement of tectonic plates, which lasted millions of years. Indonesia is located right at the confluence of three major plates of the earth the Indo-Australian Plate is moving north, Plate Euro-Asia were moving south, as well as the Pacific Plate is moving westward, Indo-Australian plate under the sign plate Euro-Asia.

With so many disasters that continually experienced from year to year is important for Indonesia to mobilize the community to have a community-based disaster management. Central River South Village of Cangkringan Sleman Glagaharjo located on the slopes of Mount Merapi highly vulnerable. This time they have had a community-based disaster management that is Disaster-Prone Management Team (PRB) Parikesit.

Through Tim PRB Parikesit, the community of Central River South Village invited to active disaster alert since the pre-disaster (mitigation), during the disaster and post-disaster. This meant that disaster risk can be minimized.

This study is intended to provide input to the PRB to improve its management team so as to provide more optimal results. In addition, for this paper as a reference for people to form a team of community-based disaster management in their respective regions.

Keywords: Disaster, Community-based Disaster Management

Pendahuluan

Latar Belakang

Dari tahun ke tahun belakangan ini kejadian bencana terhitung terus meningkat. Teramat sulit untuk memperhitungkan kapan tiba di puncak, lalu berharap jumlahnya makin menurun. Bahkan, seiring perubahan iklim global

dan degradasi lingkungan diperkirakan pada tahun 2014 hampir mustahil intensitas bencana makin surut.

Kondisi itu berdasarkan kenyataan yang terjadi selama tahun 2013 yang masih berlanjut hingga awal tahun 2014. Bencana tersebut antara lain bencana banjir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia serta meletusnya Gunung Sinabung yang telah merengut korban jiwa. Data peningkatan bencana tahun 2002 juga menjadi acuan, bahwa tahun 2002 terjadi sebanyak 190 kali bencana meningkat menjadi 1.675 kali pada tahun 2009 atau hampir 9 kali lipat yang sebagian besar berupa bencana hidrometeorologi.

Melihat jauh ke belakang, sejarah bencana di Indonesia pada tahun 1815 Gunung Tambora di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, meletus dengan korban jiwa sekitar 92.000 orang serta membuat udara di atas Pulau Madura gelap selama tiga hari. Tahun 1883 Indonesia kembali berguncang dengan letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda yang sempat mendinginkan atmosfer selama sepekan. Kekuatan ledakannya setara 200 megaton TNT (trinitrotoluene) atau sekitar 13.000 kali kekuatan ledakan bom atom yang menghancurkan Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dalam Perang Dunia II.

Sebenarnya Indonesia amat rawan bencana dan merupakan salah satu pusat lokasi megabencana. Hal ini karena secara geologis Indonesia berada pada alur cincin api. Pemahaman akan cincin api ialah dalam proses pergerakan lempeng bumi yang berlangsung jutaan tahun, Indonesia berada tepat di pertemuan tiga lempeng utama bumi yakni Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, Lempeng Euro-Asia yang bergerak ke selatan, serta Lempeng Pasifik yang bergerak ke Barat. Lempeng Indo-Australia masuk di bawah Lempeng Euro-Asia.

Di daerah penunjaman (zona subduksi) muncul sejumlah hotspot (titik api) yang kemudian mengeluarkan magma ke permukaan bumi, dan terbentuklah gunung api. Alur sepanjang pertemuan Lempeng Indo-Australia

dan Lempeng Euro-Asia tersebut merupakan jalur gempa bumi sekaligus jalur rangkaian gunung api, mulai dari sepanjang barat Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Di Indonesia Timur jalur ini berbelok ke Maluku dan Sulawesi Utara. Sebagian jalur patahan juga muncul di Papua. Jalur pertemuan inilah yang di sebut alur cincin api. Sehingga wajar apabila secara bergiliran gunung api di wilayah Indonesia akan meletus dari waktu ke waktu. Bahkan di Pulau Jawa saja tahun 2010, 120 juta orang tinggal di dalam bayang-bayang lebih dari 30 gunung berapi.

Banyaknya bencana yang menimpa di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini menjadi topik terhangat untuk dibicarakan. Dasyatnya bencana, membludaknya jumlah korban, serta kerugian material yang besar menjadi ukuran bahwa bencana yang terjadi tidak bisa dianggap sebelah mata.

Dalam 10 tahun terakhir telah terjadi beberapa bencana-bencana besar di Indonesia. Berawal dari bencana Tsunami yang menghancurkan daerah pesisir Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004. Bencana Tsunami dipicu oleh gempa yang berpusat di lautan berkekuatan lebih dari 8,2 skala Richter. Bencana ini merusak ribuan rumah serta menewaskan lebih dari lima ribu orang. 2 tahun berikutnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi kota yang mendapat giliran mendapat bencana. Gempa bumi dengan kekuatan 6,3 skala Richter yang berpusat di pantai selatan menggoyang kota pelajar. Dampaknya, ribuan rumah hancur dan 5.749 orang meninggal dunia. Bencana gempa bumi yang melanda DIY melanda begitu saja tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Bahkan diwaktu yang sama masyarakat DIY lebih memperhatikan aktivitas Gunung Merapi yang meningkat status aktivitasnya.

Tahun 2010 bencana semakin menjadi . Dimulai dari tanggal 4 Oktober 2010, air bah melanda Wasior yang berada di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Hujan yang mengguyur semalaman meluapkan

empat sungai yang melumat kota sepanjang 23 kilometer itu. Lumpur, batu-batu sebesar metromini, dan batang kayu seukuran drum dalam sekejap menimbun kota. Banjir itu hanya menerjang selama 20 menit namun mengakibatkan seratus tujuh puluh empat orang tewas, lainnya hilang, lebih dari 5.000 jiwa mengungsi.

Berlanjut tanggal 25 Oktober 2010, bencana gempa bumi yang diikuti oleh gelombang Tsunami menerjang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tercatat 510 orang tewas, 54 orang hilang, serta ratusan rumah hancur. Medan Mentawai yang berat, terletak di dekat Lautan Hindia, dengan gelombang yang tinggi membuat para korban jauh dari jangkauan pertolongan. Infrastruktur yang minim juga menyulitkan pengiriman bantuan.

Selasa malam, 26 Oktober 2010. Lagi-lagi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat ujian bencana. Bukan bencana gempa bumi namun berupa erupsi Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi mengeluarkan material vulkanik dan awan panas. Awan panas atau sering diberi nama Wedhus Gembel mempunyai suhu ratusan celcius serta kecepatan guguran hingga 200km/jam. Wedhus Gembel ini juga lah yang memakan korban hingga 279 nyawa.

Awal tahun 2014, kita sudah disajikan bencana lain berupa banjir di Ibu Kota Negara, Jakarta. Disusul erupsi Gunung Sinabung dan Gunung Kelud yang dampaknya sampai ke daerah Jawa Barat berupa abu vulkanik. Menurut para ahli kesehatan abu vulkanik mempunyai dampak buruk pada proses pernapasan contohnya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Namun sangat disayangkan, pengalaman dari berbagai macam bencana besar yang telah terjadi di wilayah Indonesia, belum juga memberi kesadaran dan pelajaran berharga bagi para elite di negeri ini. Saat ini penanggulangan bencana yang dijalankan pemerintah masih lambat, berbelit-belit, birokratis. Bahkan ada pihak yang alih-alih ikut berpikir mencari jalan memperkuat manajemen bencana, malah menjadikan bencana sebagai ajang

kampanye politik. Bendera partai dan foto-foto calon pejabat bertebaran, yang sering kali jauh lebih heboh daripada besarnya bantuan yang dikucurkan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mestinya dapat membuat masyarakat sedikit bernapas lega. Undang-undang ini merupakan perbaikan dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Peraturan itu antara lain menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (pasal 5) dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB (pasal 10, ayat 1) dengan dua perangkat utama organisasi, yakni unsure pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana (pasal 11). Keanggotaan unsur pengarah terdiri atas pejabat pemerintah terkait dan anggota masyarakat profesional (pasal 14, ayat 2) dengan sederet tugas penting, termasuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana (pasal 14, ayat 1).

Persoalannya yakni, urusan bencana masih saja dimasukkan ke ranah politik dengan mewajibkan seluruh unsur keanggotaan tim pengarah dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan DPR RI (pasal 14, ayat 3). Pertanyaannya, apakah para anggota DPR RI yang menguji para anggota pengarah ini ahli dan paham betul soal teknis penanggulangan bencana?.

Keanehan lain, dalam undang-undang itu diatur pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi diisyaratkan dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib, dan di tingkat kabupaten/kota setingkat di bawah bupati/wali kota atau setingkat eselon IIa. Padahal, belum tentu para elite di tingkat tersebut paham serta memiliki komitmen. Sangat sulit mencari orang-orang yang memiliki komitmen, kepedulian, pengalaman, dan keahlian dalam bidang bencana. Aturan di atas malah memberi persyaratan birokratis yang

membatasi kemungkinan diikutsertakannya partisipasi putra-putri terbaik bangsa secara luas dalam menangani masalah bencana.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 24, pada 27 April 2007, mewajibkan BNPB dibentuk paling lambat enam bulan dan BPBD paling lambat satu tahun terhitung sejak peraturan itu berlaku. Kenyataannya, pembentukan BNPB terlambat hingga tiga bulan dan banyak BPBD belum terbentuk. Selain itu, beberapa peraturan pemerintah yang menjadi perangkat pokok pelaksanaan undang-undang yang juga harus terbit paling lambat enam bulan setelah UU Nomor 24 disahkan juga terlambat diterbitkan. Efeknya, sederet peraturan daerah ikut terlambat. Dengan kata lain, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara berjemaah telah tidak sigap sekaligus melanggar undang-undang. Padahal, sementara itu bencana demi bencana terus terjadi.

Saat ini DIY telah mempunyai Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) di wilayah masing-masing. Dalam suatu pelatihan kebencanaan yang diikuti penulis tahun 2013, di Dlinggo. Masing-masing BPBD dari wilayah masing-masing telah mempunyai program terkait kesiapsiagaan bencana. BPBD Bantul mempunyai program Desa Tanggap Bencana di pesisir pantai selatan. Namun dalam kenyataannya yang diakui pula oleh wakil dari BPBD Bantul bahwa program hanya sebatas simulasi bencana setelah itu tidak ada keberlanjutan lagi. Sama halnya BPBD Sleman, hanya sekali datang untuk memberikan pelatihan *Standart Operational Prosedure* (*SOP*) kebencanaan dan simulasi di daerah rawan bencana lereng Gunung Merapi. Hal ini selaras dengan informasi terbaru yang didapat penulis pada Januari 2014 tentang kegiatan yang dilakukan BPBD Sleman, yakni; Pemeliharaan *Early Warning System* (*EWS*) dan pemberian bantuan kepada korban bencana. Pertanyaannya, jadi tidak ada keberlanjutan dari pelatihan *SOP* dan simulasi kebencanaan? Apakah cukup hanya satu kali?. Padahal sebelum erupsi Gunung Merapi yang

menelan korban jiwa hingga ratusan orang tahun 2010, Gunung Merapi juga menunjukkan aktivitas erupsi saat gempa tahun 2006. Apabila dilakukan pemeliharaan yang baik dari dulu mungkin korban jiwa tidak sebanyak ini. Perlu diketahui bahwa saat erupsi Merapi tahun 2010 EWS yang berupa sirine tidak berfungsi. Padahal EWS merupakan alat pendeteksi dini bencana. Selanjutnya, pemberian bantuan kepada korban bencana. Maksudnya apa kegiatan ini? Apakah menunggu terjadi bencana lagi?. Mungkin harusnya ada program atau upaya yang sifatnya preventif.

Berbagai masalah di atas harusnya memunculkan pola pikir baru. Bahwa penanggulangan bencana tidak dapat menunggu bantuan, ketergantungan pada EWS atau arahan dari pihak lain. Masyarakat harus sadar bahwa kehidupan keseharian mereka berdampingan dengan bencana. Bencana tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Pemukiman yang masuk daerah rawan bencana harus mandiri dalam mengantisipasi bencana. Mandiri dalam arti bahwa dalam manajemen penanggulangan bencana dibutuhkan partisipasi masyarakat. Keunggulan manajemen bencana yang berbasis partisipasi masyarakat yakni masyarakat tahu betul tentang wilayahnya dan dapat secara akurat dalam menentukan titik-titik rawan bencana serta jalan-jalan alternatif evakuasi.

Di Indonesia penanggulangan bencana yang diterapkan masih konvensional. Hampir seluruh kegiatan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana selalu *“top down”*. Pemerintah cenderung tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat hanya bertindak sebagai obyek dengan segala dasar kelemahannya yang menempel.

Penanggulangan bencana secara partisipatif lebih mementingkan proses dan hasil dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan antar masyarakat lokal dalam mengelola sumber dayanya dan resiko bencana, dibanding

pengakuan ilmiah. Metode seperti ini jamak disebut *Participatory Risk Appraisal* (PRA) atau pengkajian risiko (bencana) secara partisipatif.

Salah satu lokasi yang mengaplikasi manajemen penanggulangan bencana partisipatif berbasis masyarakat yakni di Dusun Kali Tengah Kidul, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman. Dusun ini terletak di lereng Gunung Merapi sebelah selatan. Gunung Merapi merupakan gunung teraktif di dunia. Aktivitas Gunung Merapi tidak dapat diduga oleh siapapun dan dapat sewaktu-waktu meningkat aktivitasnya. Dengan hanya berjarak kurang dari 10 km dari puncak Gunung Merapi, Dusun Kali Tengah Kidul merupakan kawasan rawan bencana khususnya bencana geologis berupa letusan atau erupsi gunung berapi. Masyarakat dusun ini, harus waspada pada ancaman bencana sebelum, saat, dan pasca erupsi Gunung Merapi. Ancaman sebelum erupsi Gunung Merapi seperti, gempa tektonik, guguran material, serta gemuruh tanda aktivitas gunung meningkat yang secara psikologis sangat berpengaruh bagi mental masyarakat. Kemudian ancaman saat terjadi erupsi yakni, awan panas (wedhus gembel), lava pijar, hujan abu, dan hujan batu (material vulkanik). Ancaman terakhir pasca erupsi, yakni banjir lahar hujan. Hal ini terjadi saat di puncak Gunung Merapi terjadi hujan lebat, kemudian membawa sisa-sisa erupsi berupa pasir berjuta-juta kubik, batu segala ukuran, serta kayu sisa hutan yang hancur akibat erupsi. Semua material menjadi satu dan mengalir menuju daerah yang lebih rendah, menerjang semua yang dilintasinya, masuk ke aliran sungai menghancurkan tanggul dan jembatan. Lahar hujan ini sering juga memakan korban bagi para penambang pasir yang tidak waspada.

Dengan kondisi seperti di atas, dengan segala ancaman saat erupsi yang terjadi pada tahun 2010 silam, masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul secara mandiri membentuk Tim Siaga Merapi (sekarang bernama Tim Pengurangan Resiko Bencana Parikesit). Tim PRB Parikesit dikelola sendiri

secara swadaya oleh masyarakat lokal. Tim PRB Parikesit beranggotakan masyarakat lokal yang sadar berkeinginan untuk menyelamatkan masyarakat dan secara fisik serta kemampuan, mampu untuk menjalankan tugas dalam kepengurusan sesuai dengan tugas yang diberikan. Fungsi pembentukan Tim Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Parikesit yakni untuk manajemen dan menentukan tindakan secepatnya yang harus dilakukan masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul dalam menghadapi bencana erupsi Merapitanpa menunggu arahan dari pemerintah yang terlalu birokratis dan terlambat dalam bertindak. Pengetahuan mengenai kebencanaan di dapatkan dari para sukarelawan yang memberikan pelatihan tentang kebencanaan serta pengalaman masyarakat dalam mengenali tanda-tanda alam sebelum terjadinya erupsi. Hasil manajemen berbasis masyarakat yang di usung tim ini pada erupsi 2010 ialah semua masyarakat dusun Kali Tengah Kidul selamat dari bencana erupsi Merapi yang menghancurkan dusun. Hanya saat di barak pengungsian pertama, lima masyarakat dusun ini menjadi korban erupsi. Bukan karena tidak siap dalam menghadapi bencana namun menjalankan tugas sebagai Tagana untuk menjaga logistik di tempat pengungsian tersebut.

Melihat kondisi tersebut tentunya penulis mempunyai anggapan bahwa Tim Siaga Merapi yang berubah nama menjadi Tim PRB Parikesit serta warga Dusun Kali Tengah Kidul yang mempunyai warga sekitar 110 Kepala Keluarga mempunyai suatu manajemen penanggulangan bencana sendiri sebagai upaya mereka mempertahankan diri secara mandiri dari bencana erupsi Merapi. Masyarakat seperti sudah sadar betul akan bahaya yang selalu membayangi terkait kehidupan mereka yang berada pada wilayah bencana.

Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, dirumuskan masalah: “Bagaimana warga dusun Kali Tengah Kidul Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan Sleman

melaksanakan Manajemen Penanggulangan Bencana sebagai upaya mempertahankan diri secara mandiri dari bencana erupsi gunung Merapi?”

Tujuan Penelitian

Mengetahui manajemen pengelolaan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat di bencana Dusun Kali Tengah Kidul, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman sehingga dapat dipelajari oleh kelompok masyarakat kawasan rawan bencana yang lain.

Manfaat Penelitian

Untuk memberi masukan kepada instansi terkait, khususnya BPBD Sleman agar dapat berbenah dalam hal koordinasi dan kesiapsiagaan bencana.

Tinjauan Pustaka

Sesuai Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana adalah: “Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian”.

Dari banyaknya pengamatan akan bencana, maka dapat ditemukan karakteristik dari bencana itu sendiri sebagai berikut:

1. Terdapat kerusakan pada pola kehidupan normal. Kerusakan tersebut biasanya terlihat cukup parah, sebagai akibat dari kejadian yang mendadak dan tidak terduga serta luasnya cakupan akan dampak dari bencana.
2. Dampak dari bencana merugikan manusia, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Biasanya dapat berupa kematian, kesakitan,

kesengsaraanm, maupun akibat negative lainnya yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

3. Merugikan struktur sosial, seperti kerusakan pada sistem pemerintahan, bangunan, komunikasi, dan berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum lainnya.
4. Adanya pengungsian yang membutuhkan tempat tinggal atau penampungan, makanan, pakaian, bantuan kesehatan dan pelayanan sosial. Yang terkadang tidak mencukupi atau kurang koordinasi (Royan, 2004:18)

Undang-Undang No.24 Tahun 2007 menetapkan jenis-jenis bencana sebagai berikut:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Bencana alam dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan penyebabnya yaitu bencana geologis, klimatologis dan ekstra-terrestrial. Bencana alam geologis adalah “bencana alam yang disebabkan oleh gaya-gaya dari dalam bumi.” Sedangkan bencana alam klimatologis adalah “bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, suhu atau cuaca.” Lain halnya dengan bencana alam ekstra-terrestrial, yaitu “bencana alam yang disebabkan oleh gaya atau energi dari luar bumi.”Bencana alam geologis dan klimatologis lebih sering berdampak terhadap manusia.

Kondisi topografi Dusun Kali Tengah Kidul sangat rentan terhadap bencana alam geologis letusan gunung berapi yang diikuti dengan adanya awan panas, lava pijar, gempa bumi, lahar hujan, hujan abu dan hujan batu (material vulkanik) karena letak dusun yang hanya berjarak antara 4 – 5 km

dari puncak gunung Merapi. Kondisi semakin berbahaya karena kubah sisi selatan gunung Merapi terbuka karena erupsi Merapi tahun 2010 lalu dan tepat mengarah kearah dusun ini. Untuk itu Dusun Kali tengah Kidul ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB).

Manajemen Bencana menurut UNDP (1994:31) ialah “salah satu cara dalam penanggulangan bencana”. Manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana, yang bertujuan untuk :

1. mencegah kehilangan jiwa;
2. mengurangi penderitaan manusia;
3. memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta ;
4. mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Menurut UNDP (1994), secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;
2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;
3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau

kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan didalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.

Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi.

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi.

Mitigasi bencana merupakan “salah satu tahap manajemen bencana sebelum terjadinya bencana”. Kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana erat kaitannya dengan istilah mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang,(UNDP, 1994:42).

Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan

memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

Rachmat (2007:5) berpendapat bahwa penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan kelembagaan dalam bentuk kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat, manajemen barak dan evakuasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana,

Sementara itu upaya untuk memperkuat pemerintah daerah dalam kegiatan sebelum/pra bencana dilakukan melalui perkuatan unit/lembaga yang telah ada dan pelatihan kepada aparatnya serta melakukan koordinasi dengan lembaga antar daerah maupun dengan tingkat nasional. Mengingat bencana tidak mengenal wilayah administrasi, sehingga setiap daerah memiliki rencana penanggulangan bencana yang potensial di wilayahnya.

Pemerintah, swasta maupun masyarakat secara bersama-sama perlu mempersiapkan, memperhatikan dan melakukan mitigasi bencana, antara lain:

1. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana
2. Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, perhitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan.

3. Identifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya menanggulangi kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang baik
4. Pelaksanaan program atau tindakan riil dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan.
5. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana (BPLHD Jawa Barat, 2004:64).

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai subyek secara aktif dalam segala prosesnya.

Keuntungannya, selain memberdayakan masyarakat secara langsung untuk tanggap terhadap bencana ialah masyarakat sendirilah yang paling mengenal wilayah tempat mereka tinggal, sehingga lebih akurat dalam memetakan segala bentuk potensi dalam menghadapi bencana.

Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan kelembagaan dalam bentuk kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat, manajemen barak dan evakuasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini tidak untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggunakan apa yang ada tentang suatu variable dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan dan membuat penafsiran yang dikaitkan dengan teori yang ada (Bungin Burhan, 2001:27-30).

Definisi Konsep

Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai subyek secara aktif dalam segala prosesnya.

Definisi Operasional

Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat menurut UNDP dapat diukur dari tiga kegiatan utama yang melibatkan masyarakat sebagai subyeknya, yaitu :

Pra Bencana (Mitigasi)

- a) Penilaian Bahaya (*hazard assessment*)
- b) Peringatan (*warning*)
- c) Persiapan (*preparedness*)

Saat Terjadi Bencana

- a) *Search and Rescue* (SAR)
- b) Bantuan Darurat
- c) Pengungsian

Pasca Bencana

- a) Pemulihan
- b) Rehabilitasi
- c) Rekontruksi

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian ini yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007:83).

2. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007:70).

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mengumpulkan informasi dari buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:302).

Teknik Pengambilan Sampel

Terkait penelitian yang akan dilakukan, maka dilakukan pengumpulan responden sesuai dengan arah penelitian. Responden harus benar-benar mengetahui tentang mitigasi bencana yang diterapkan pada Dusun Kali Tengah Kidul. Hal tersebut dilakukan karena peneliti beranggapan bahwa tidak

semua masyarakat yang ada di dusun tersebut mengetahui dengan baik tentang manajemen bencana khususnya mitigasi bencana.

Untuk itu peneliti menggunakan metode pengambilan responden atau sampel dengan metode purpose sampling (sampel bertujuan) yaitu teknik sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 1997:128).

Berikut beberapa responden yang telah dipilih sebagai responden:

1. Kepala Dusun : 1 orang
2. Ketua Rukun Warga (RW) : 1 Orang
3. Ketua Rukun Tetangga (RT) 2 orang
4. Ketua Tim Siaga (PRB) : 1 orang
5. Masyarakat Dusun : 3 orang

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan data administrasi kecamatan Cangkringan, letak Dusun Kali Tengah Kidul berada di Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Kali Tengah Kidul berada pada lereng Gunung Merapi bagian Selatan dan termasuk dalam klasifikasi wilayah Kawasan Rawan Bencana III (KRB III). KRB III merupakan kawasan yang sebenarnya dilarang sebagai tempat pemukiman karena jaraknya yang kurang dari 7 km dari puncak Gunung Merapi.

Dusun Kali Tengah Kidul merupakan salah satu dari sepuluh dusun yang berada di Desa Glagaharjo, termasuk Dusun Kali Tengah Lor, Dusun Srunen, Dusun Singlar, Dusun Gading, Dusun Jetis Sumur, Dusun Galagah Malang, Dusun Ngancar, Dusun Banjarsari, Dusun Besalem.

Secara geografis, sebelah utara wilayah Dusun Kali Tengah Kidul berbatasan dengan Hutan Rakyat Merapi, sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Srunenm sebelah timur berbatasan dengan Desa Balerante, Kabupaten

Klaten dan sebelah barat berbatasan dengan Kali Gendol dan Desa Kepuhharjo.

Sebelum tahun 1994, warga Dusun Kali Tengah Kidul tidak pernah mengungsi saat terjadi erupsi Merapi. Para warga beranggapan bahwa erupsi Merapi adalah hal wajar dan tidak akan menimbulkan bahaya di wilayah mereka. Anggapan demikian masih dianggap rasional karena memang belum pernah ada korban jiwa saat terjadi erupsi Merapi di Dusun Kali Tengah Kidul.

Anggapan warga mulai berubah saat erupsi Gunung Merapi pada tahun 1994. Erupsi kali ini menimbulkan korban jiwa hingga 94 jiwa di wilayah Turgo yang berada di sebelah barat Dusun Kali Tengah Kidul. Dilihat secara letak, wilayah Turgo hampir sama dengan Dusun Kali Tengah Kidul. Sama-sama berada di lereng gunung Merapi dan berjarak kurang dari 10 Km dari puncak Gunung Merapi.

Peristiwa inilah yang menjadi titik balik dari paradigma dan anggapan warga Dusun Kali Tengah Kidul. Warga belajar dari pengalaman dari wilayah Turgo dan tidak menghendaki kejadian yang sama menimpa wilayah mereka hingga menelan korban jiwa. Setelah peristiwa itu, warga, selalu mengungsi saat terjadi erupsi Merapi. Warga juga 'Niteni' atau mencermati tanda-tanda alam yang menunjukkan aktivitas dan gejala erupsi Merapi.

Tahun 1994 hingga tahun 2005, warga memanajemen diri mereka dengan pengalaman yang ada, serta kebiasaan mereka untuk mencermati tanda-tanda yang ditunjukkan Gunung Merapi. Tahun 2006 Manajemen Bencana mulai terstruktur. Warga membentuk struktur khusus dalam manajemen bencana. Dalam pembentukan struktur kepengurusan warga dibantu oleh pihak dari Universitas Gadjah Mada. Namun hanya sebatas struktural, warga belum mengetahui secara detail apa yang harus mereka lakukan. Dalam menjalankan struktural kepengurusan para warga masih menganut manajemen bencana 'Niteni' gejala erupsi Gunung Merapi.

Hingga akhirnya tahun 2009, dengan bantuan dari Universitas Gajdah Mada warga melakukan simulasi bencana. Dalam simulasi tersebut warga diberikan peran sesuai dengan jabatan yang diemban dalam struktur manajemen bencana yang mereka buat bersama-sama. Dari sinilah, warga mulai tahu tentang detail tugas yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Setahun setelah simulasi, tepatnya tahun 2010. Manajemen Berbasis Masyarakat ini langsung diuji dengan erupsi Merapi dasyat yang menghancurkan wilayah lereng gunung bagian selatan. Dengan pengetahuan yang warga miliki mereka secara bersama-sama menjalankan fungsi masing-masing hingga tidak ada korban jiwa di Dusun Kali Tengah Kidul.

Dari pengalaman sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, kondisi di barak pengungsian, kemudian pasca bencana. Warga menyadari ada yang harus disempurnakan dalam manajemen penanggulangan bencana yang mereka miliki, maka terbentuklah kepengurusan team Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Parikesit. Dalam agenda serta manajemen yang ada dalam PRB Parikesit semua tahapan-tahapan dan proses terkait kebencanaan lebih disempurnakan sehingga akan lebih efektif saat terjadi bencana pada kemudian hari.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi di Dusun Kali Tengah Kidul, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penulis mengidentifikasi hasil penelitian sebagai berikut:

Pra Bencana (Mitigasi)

1. Penilaian Bahaya (*hazard assessment*)

Diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan asset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan

tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana dimasa lalu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dusun, dapat dijelaskan bahwa warga Dusun Kali Tengah Kidul melakukan pengamatan dan evakuasi secara mandiri tanpa menunggu arahan dari pemerintah. Masyarakat dusun ini menganggap bahwa birokrasi pemerintah memperlambat dalam proses evakuasi. Masyarakat juga sadar bahwa mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah dalam bidang pengembangan daerah karena masyarakat dusun Kali Tengah Kidul berada dalam Kawasan Rawan Bencana III (KRB III) dan menolak untuk direlokasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RW Dusun Kali Tengah Kidul diperoleh informasi bahwa masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul belajar mengenai manajemen bencana melalui kelompok-kelompok sukarelawan yang memberikan pelatihan serta membuat SOP dengan bantuan BPBD Sleman walaupun hanya satu kali datang pada tahun 2012 selepas erupsi Merapi 2010. Selain itu masyarakat yang diwakili oleh PRB Parikesit telah melakukan pendataan warga, aset yang dimiliki serta sebagian besar masyarakat telah membekali diri dengan alat komunikasi HT yang dihubungkan dengan Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan (BPPTK), sekarang menjadi Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), pos pengamatan Balerante untuk mengetahui perkembangan terbaru dari aktivitas Gunung Merapi disamping membaca tanda-tanda alam. Frekuensi HT juga disesuaikan dengan alat pendeteksi dini lahar hujan yang berada jauh di atas gunung. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk memperingatkan warga yang sebagian besar bekerja sebagai penambang pasir untuk evakuasi apabila terjadi lahar hujan di atas gunung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PRB, diperoleh informasi bahwa manajemen penanggulangan bencana PRB Prikesisit setelah erupsi mengalami peningkatan dalam hal pendataan warga, pendataan ternak serta aset berharga. Pendataan warga meliputi balita/anak, lansia, ibu hamil serta disabilitas yang merupakan kelompok rentan. Pendataan ternak meliputi sapi dan kambing. Pendataan aset termasuk kendaraan pribadi roda dua hingga roda enam. Dalam manajemen masyarakat dusun Kali Tengah Kidul juga menekankan memprioritaskan surat-surat berharga serta keluarga masing-masing terlebih dahulu saat evakuasi. Masyarakat dusun dan PRB Parikesit juga selalu memantau perkembangan keadaan terkait aktivitas Merapi melalui HT yang dihubungkan dengan frekuensi BPPTK (sekarang BPPTKG) untuk melakukan tindakan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris PRB Parikesit, menekankan kembali bahwa ada peningkatan manajemen bencana berbasis masyarakat PRB Parikesit setelah terjadinya erupsi Merapi 2010 khususnya dalam hal pendataan warga, ternak dan aset warga. Manajemen sebelum tahun 2010 dilakukan saat terjadi peningkatan aktivitas Merapi. Untuk manajemen yang baru, pendataan dilakukan secara berkala bukan hanya saat terjadi peningkatan aktivitas Merapi. Hasil wawancara ini juga menekankan kembali bahwa masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul telah sepaham bahwa saat evakuasi harus memprioritaskan keluarga terlebih dahulu untuk mengurangi kemungkinan adanya masyarakat yang tertinggal saat proses evakuasi.

2. Peringatan (*warning*)

Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi

untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim PRB dijelaskan bahwa dalam memberikan peringatan tentang bahaya yang mengancam terkait aktivitas Merapi, masyarakat dan PRB Parikesit mendapat informasi dari Pak Dukuh dan KSM. Namun masyarakat dan PRB Parikesit juga melakukan pemantauan secara mandiri menggunakan HT untuk mengetahui perkembangan terbaru aktivitas Merapi. Apabila informasi yang didapat menandakan keadaan bahaya maka masyarakat khususnya tim PRB Parikesit segera menggelar rapat koordinasi untuk menentukan langkah evakuasi dan menyebarluaskan secepat mungkin kepada masyarakat dusun Kali Tengah Kidul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Tim PRB, dijelaskan bahwa masyarakat ataupun anggota PRB Parikesit secara mandiri masuk dalam frekuensi komunikasi pemerintah (BPPTKG dan Pos Pemantauan Merapi) untuk mendapatkan informasi lebih cepat, sehingga masyarakat dan PRB Parikesit dapat melakukan evakuasi secepatnya tanpa komando dari pemerintah apabila mereka anggap keadaan sudah mengkhawatirkan. Masyarakat tetap belum sepenuhnya yakin akan keberadaan EWS yang dibangun oleh pemerintah untuk peringatan dini warga. Hal tersebut karena pengalaman yang telah mereka dapatkan di Kinahrejo. EWS hanya berbunyi beberapa saat kemudian tidak berfungsi karena terjangan awan panas. Masyarakat menganggap peringatan dari EWS terlambat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga dapat disimpulkan bahwa peringatan akan terjadinya bahaya terkait aktivitas Merapi tidak hanya menunggu dari arahan Pak Dukuh. Namun masyarakat juga melihat

tanda-tanda alam yang terjadi, seperti fenomena turunnya hewan-hewan dari atas gunung dan hawa panas yang dirasakan berbeda dengan biasanya. Tanda-tanda alam tersebut juga menjadi acuan bagi warga untuk melakukan proses evakuasi secepatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga juga dijelaskan bahwa masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul mempunyai indikator unik sebagai peringatan bahaya aktivitas Merapi, yakni dengan mengamati dan mendengar suara pohon bambu. Masyarakat menganggap hujan abu ialah siklus alami. Namun apabila terlihat dan terdengar pohon bambu banyak yang roboh karena tidak kuat menampung banyaknya abu yang menempel pada daun maka menandakan bahaya dan bersiap untuk proses evakuasi. Dari pengamatan penulis memang banyak pohon bambu yang tumbuh di sekitar Dusun Kali Tengah Kidul.

3. Persiapan (*preparedness*)

Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua Tim PRB dijelaskan bahwa PRB Parikesit selain melakukan pendataan warga juga telah membuat dan mensosialisasikan peta evakuasi (alur evakuasi warga dan ternak) yang dibuat dan disepakati bersama. Termasuk penetapan titik kumpul dan persiapan transportasi saat proses evakuasi berlangsung. Penyediaan alat transportasi dikhususkan bagi masyarakat yang belum mempunyai kendaraan pribadi untuk evakuasi. Namun dijelaskan kembali bahwa masyarakat saat ini sebagian besar telah mempunyai alat

transportasi pribadi. Penentuan waktu untuk kembali dari pengungsian ditentukan dari tiga hal yakni; observasi secara langsung, melihat tanda-tanda alam serta informasi yang didapatkan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Tim PRB dijelaskan bahwa PRB Parikesit telah menghimbau kepada masyarakat untuk membuat rencana aksi saat proses evakuasi di dalam keluarga masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar tiap-tiap keluarga mengetahui kemampuan dan kebutuhan dalam proses evakuasi. Apabila kebutuhan transportasi kurang dalam suatu keluarga maka dianjurkan untuk secepatnya menuju titik kumpul yang telah ditentukan saat proses evakuasi. Hal ini sesuai dengan paham masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul yang telah disepakati bersama yakni memprioritaskan keluarga terlebih dahulu dalam proses evakuasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Tim PRB dapat dijelaskan bahwa: belajar dari pengalaman yang di dapat selama proses evakuasi dan berada di barak pengungsian. PRB Parikesit dibantu masyarakat terus meningkatkan manajemen penanggulangan berbasis masyarakat yang telah dimiliki. Peningkatan manajemen yang dilakukan ialah dengan pengadaan tas yang digunakan untuk menyimpan semua surat-surat berharga serta barang-barang yang harus ada saat proses evakuasi, seperti senter, obat pribadi, pakaian seperlunya dan sebagainya. Pengadaan tas yang diberi nama tas siap minggat ini berdasarkan pengalaman saat melakukan evakuasi. Banyak surat-surat berharga yang tertinggal dan tidak terselamatkan karena tidak siap, panik dan tidak menempatkan barang-barang tersebut dalam satu tempat saat proses evakuasi. Keberadaan tas siap minggat ini diharapkan dapat membantu dalam keadaan darurat. Namun ada masalah dalam pengadaan tas siap minggat yang bekerjasama dengan *Search and Rescue (SAR)* Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni *design* yang kurang sesuai, tali kurang kuat dan bentuk tabung tanpa mempunyai sekat-sekat untuk memisahkan antara surat-surat berharga dan keperluan pribadi lainnya. Peningkatan manajemen selanjutnya ialah tabungan. Tabungan ini dipergunakan untuk kepentingan masyarakat saat melakukan evakuasi. Ide diberlakukannya tabungan dalam manajemen bencana berasal dari pengalaman masyarakat saat berada di barak pengungsian. Masyarakat lupa, tidak sempat atau bahkan tidak mempersiapkan sama sekali kebutuhan uang pada saat evakuasi, sehingga hanya mengandalkan bantuan dari pihak luar. Hal ini dianggap oleh masyarakat merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan. Untuk itu diciptakanlah tabungan yang terinspirasi dari cerita teman salah satu warga Kali Tengah Kidul yang berasal dari Thailand. Sistem yang diberlakukan dalam tabungan ini ialah jimpitan seperti halnya kegiatan ronda. Jimpitan dilakukan setiap malam. Hasil jimpitan akan dicatat dan dikumpulkan oleh anggota PRB Parikesit. Catatan tabungan dipegang oleh penabung dan anggota PRB Parikesit yang diberi kewenangan mengelola tabungan tersebut. Tabungan ini boleh diambil setengah dari total tabungan masing-masing keluarga pada akhir tahun. Setengah tabungan sisanya tetap sebagai persiapan saat evakuasi.

Saat Terjadi Bencana

1. *Search and Rescue (SAR)*

Kegiatan penyelamatan sangat diperlukan saat terjadi bencana, karena kemungkinan ada masyarakat yang terjebak disituasi kritis sehingga tidak dapat mengevakuasi diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim PRB diperoleh penjelasan bahwa tindakan SAR telah ada dalam manajemen PRB

Parikesit. Kegiatan SAR dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul yang sehat secara fisik dan berani secara mental. Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan SAR ini berupa penyelamatan pada masyarakat yang belum dievakuasi serta penjagaan kawasan Dusun Kali Tengah Kidul dari aksi penjarahan dan sejenisnya. Saat erupsi 2010 sebagian besar masyarakat telah melakukan evakuasi awal secara mandiri tanpa menunggu arahan dari Pak Dukuh, KSM ataupun PRB Parikesit. Namun hal tersebut dianggap kejadian yang positif karena evakuasi lebih awal telah dianjurkan. Selanjutnya dilakukan koordinasi oleh masyarakat dengan PRB Parikesit untuk melakukan koordinasi terkait keberadaan sehingga semua masyarakat dusun dapat dipantau keberadaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Tim PRB diperoleh penjelasan bahwa PRB Parikesit dan masyarakat telah menentukan prioritas utama dalam hal evakuasi, yakni; anak, ibu hamil, lansia dan disabilitas (kelompok rentan). PRB Parikesit juga menerapkan pendataan warga di barak pengungsian untuk mendata kembali masyarakat untuk memastikan masyarakat telah dievakuasi seluruhnya. Dalam upaya SAR para pemuda atau masyarakat yang tergabung dalam tim SAR diharuskan selalu berkoordinasi. Kelompok ini juga diharuskan mematuhi prosedur yang telah disepakati dalam PRB Parikesit. Kelompok ini diharuskan mengkosongkan wilayah/dusun apabila anjuran untuk turun dan keadaan sudah mengawatirkan.

2. Bantuan Darurat

Bantuan darurat sangat vital peranannya disaat terjadi bencana. Karena bantuan dalam bentuk apapun dapat meringankan beban para pengungsi yang tentunya tidak dapat membawa banyak kebutuhan saat evakuasi.

Berkaitan dengan bantuan darurat, masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul masih mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur/sukarelawan untuk memenuhi kebutuhan saat berada di barak pengungsian. Dalam manajemen tim PRB Parikesit telah menerapkan pendataan masyarakat hingga di barak pengungsian untuk mengetahui keberadaan seluruh masyarakatnya serta wacana untuk membuat pengungsian dan pencarian donatur secara mandiri. Namun ada kelemahan dalam tahap ini ialah tim PRB Parikesit atau perwakilan dari masyarakat belum terpikirkan untuk masuk dalam manajemen/panitia pengelolaan logistik pada barak pengungsian yang mereka tempati. Akibatnya masyarakat merasa belum terjamin dalam pemenuhan kebutuhan logistik yang mereka butuhkan.

Tekad untuk mandiri diwujudkan dengan pemberlakuan sistem tabungan dengan mekanisme jimpitan di berlakukan tim PRB Parikesit dan masyarakat berdasarkan pengalaman yang didapat pada saat berada di barak pengungsian saat bencana erupsi Merapi terjadi tahun 2010 silam. Masyarakat sepakat bahwa mereka harus mandiri saat mereka diharuskan untuk evakuasi dan di pengungsian, sehingga kebutuhan dasar yang mereka butuhkan dapat terpenuhi.

3. Pengungsian

Pengungsian merupakan tempat berkumpulnya para pengungsi untuk sementara untuk menunggu suasana atau kejadian bencana kembali normal. Pengungsian diharuskan aman dari lokasi kebencanaan serta pengungsi terhindar dari hujan ataupun terik matahari (bangunan permanen, semi permanen, ataupun tenda).

Masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul bersama tim PRB Parikesit dalam manajemen bencana berbasis masyarakat yang mereka miliki,

sudah mempunyai tujuan atau tempat pengungsian yang telah ditetapkan secara bersama-sama yakni di kelurahan Glagah Malang yang berjarak 5 km dari dusun dan Cepit yang berjarak 10 km dari Dusun Kali Tengah Kidul. Belum ada wacana untuk menentukan lokasi pengungsian untuk wilayah yang lebih jauh seperti halnya anjuran pemerintah untuk mengungsi sejauh 30 km dari puncak Gunung Merapi. Pengungsian dengan jarak lebih jauh dari lokasi bencana akan lebih menjamin keselamatan masyarakat.

Pasca Bencana

1. Pemulihan

Pemulihan merupakan upaya memulihkan psikologi masyarakat yang menjadi korban bencana, dalam hal ini erupsi Merapi.

Pemulihan dalam manajemen penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang di miliki PRB Parikesit belum ada upaya pemulihan psikologi bagi masyarakatnya. Pemulihan psikologi mereka dapatkan pada saat masyarakat berada di pengungsian. Metode memulihkan psikologi yang mereka lakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara individu. Pemulihan psikologi anak-anak dilakukan oleh orang tua masing-masing dengan cara yang mereka bisa lakukan. Dalam hal ini memang belum ada upaya pemulihan psikologi bagi masyarakat di dalam manajemen penanggulangan bencana tim PRB Parikesit. Namun ada usaha dari seorang warga yang menggandeng pihak lain untuk melakukan upaya pemulihan psikologi untuk anak-anak di Dusun Kali Tengah Kidul. Metode yang dilakukan ialah mengilustrasikan gambar yang telah dibuat oleh anak-anak menjadi sebuah film yang menarik dan membuat anak-anak gembira. Film ini juga menjadi indikator sejauh mana pengetahuan

anak-anak dengan pengalaman yang mereka dapatkan langsung saat proses sebelum evakuasi, saat evakuasi dan kembali lagi ke dusun.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya membangun kembali asset-asset warga atau dusun, seperti masjid, jembatan dsb.

Tim PRB Parikesit dan masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul memasukan upaya rehabilitasi dalam manajemen penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dimiliki. Upaya rehabilitasi aset yang telah masyarakat realisasikan ialah dengan memperbaiki lima dari tujuh jembatan penghubung yang mereka miliki. Biaya untuk memperbaiki aset jembatan penghubung ini masyarakat usahakan secara mandiri/swadaya.

Tim PRB Parikesit mendapatkan bantuan dari organisasi non pemerintah YKPU. Organisasi ini membangun rumah-rumah semi permanen sebagai tempat tinggal sementara masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul sembari menunggu dan menata kehidupan kembali normal.

3. Rekontruksi

Rekonstruksi adalah upaya untuk membangun suatu sistem bangunan yang sesuai dengan kerentanan bangunan terhadap efek dari bencana yang mengancam dalam hal ini erupsi Merapi.

Tidak ada kontruksi khusus untuk bangunan pada manajemen penanggulanagan bencana tim PRB Parikesit di Dusun Kali Tengah kidul. Karena ancaman yang dihadapi bukanlah semacam gempa besar yang menimpa Yogyakarta pada tahun 2006, melainkan ancaman wedhus gembel, lahar dan muntahan material vulkanik seperti abu, pasir dan batu.

Meskipun tidak ada kontruksi khusus untuk pembuatan tempat tinggal, namun ada anjuran dalam beberapa hal yang dapat membantu

mempercepat proses evakuasi saat terjadinya ancaman dari Gunung Merapi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu, sistem bukaan pintu dianjurkan terbuka saat didorong dari dalam rumah, jendela menggunakan kaca berdimensi lebar tidak dianjurkan memakai teralis, memposisikan motor menghadap ke arah luar atau pintu, dan diusahakan gunung rumah menghadap utara-selatan untuk menghindari angin gunung.

Setelah erupsi tahun 2010 Dusun Kali Tengah Kidul memiliki fasilitas penunjang organisasi/kelompok Pengurangan Resiko Bencana. Diantaranya yakni gardu pandang, radio komunikasi, megaphone, serta *Early Warning System (EWS)* yang dibangun oleh pemerintah pada tahun 2012. Kelompok Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ini mempunyai keinginan lain untuk menambah fasilitas yang telah mereka miliki.

Para pemuda/remaja telah diberikan pemahaman dan tanggungjawab apabila terjadi bencana dan diharuskan untuk evakuasi. Mereka juga telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan saat evakuasi, misalnya; mengambil secepatnya tas “siap minggat” yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Masyarakat dusun Kali Tengah Kidul baik yang muda maupun yang telah lanjut usia sudah memahami apa yang harus mereka lakukan apabila diharuskan untuk melakukan evakuasi. Mereka juga mengerti harus kemana saat proses evakuasi berlangsung, yakni menuju titik kumpul yang telah ditentukan. RT 1 dan RT 2 berkumpul di titik kumpul dekat dengan warung Bapak Barono dan RT 3 serta RT 4 berkumpul di pos ronda di depan dusun.

Masyarakat Dusun kali Tengah kidul telah melakukan manajemen yang mereka sepakati bersama dengan Tim PRB Parikesit, diantaranya mempersiapkan tas evakuasi (siap minggat) serta rencana aksi bagi

keluarga responden saat proses evakuasi. Pemahaman masyarakat untuk memprioritaskan keluarga terlebih dahulu telah membantu proses evakuasi secara mandiri.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Kali Tengah Kidul, yang dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa PRB Parikesit Dusun Kali Tengah Kidul mempunyai Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang baik. PRB Parikesit bersama dengan masyarakat di dusun ini, sadar bahwa mereka berada dalam kawasan rawan bencana dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, maka dari itu masyarakat secara swadaya dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat serta bantuan sukarelawan membuat sendiri dan mematuhi Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat dengan membentuk PRB Parikesit untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di Dusun Kali Tengah Kidul.

Masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul mempunyai kelebihan dalam membaca tanda – tanda alam yang selalu datang sebelum adanya bencana erupsi Gunung Merapi. Masyarakat juga memadukan gejala alam tersebut dengan alat modern seperti *Handy Talkie (HT)* untuk lebih mengakuratkan informasi. Sehingga dapat menyimpulkan kapan waktu yang tepat untuk evakuasi dan kembali lagi saat keadaan aman. Perpaduan ini dianggap paling efektif untuk menentukan tingkat ancaman.

Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam manajemen penanggulangan bencana tersebut antara lain:

1. Pada saat terjadi bencana Tim PRB Parikesit (saat itu bernama Tim Siaga Merapi) terfokus pada masyarakat dusun saja, belum terpikirkan untuk

ikut ambil bagian dalam kelompok pelaksana yang ada di barak tersebut, akibatnya ada indikasi kecurangan masalah pembagian logistik yang tidak merata. Selain itu belum ada wacana untuk menentukan tempat pengungsian yang lebih jauh demi terjaminnya keselamatan masyarakat.

2. Pada tahap Pasca Bencana belum ada upaya pemulihan terhadap mental masyarakatnya dalam manajemen penanggulangan bencana tim PRB Parikesit. Upaya pemulihan ini untuk meringankan beban psikologis bagi masyarakat yang menjadi korban erupsi sehingga dapat berangsur-angsur pulih untuk menjalankan aktivitas secara normal kembali.

Saran

Untuk mengembangkan Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat di Dusun Kali Tengah Kidul sebagai berikut:

1. Pada tahap saat bencana, perwakilan masyarakat atau Tim PRB Parikesit harus bergabung dengan kepanitiaan/pengelolaan logistik pengungsian tempat dimana mereka mengungsi. Sehingga terhindar dari indikasi kecurangan dalam pemerataan logistik. Bergabungnya perwakilan dari masyarakat atau Tim PRB Parikesit dengan kepanitiaan/pengelolaan logistik juga bermanfaat sebagai media pembelajaran pengelolaan logistik apabila pengungsian mandiri telah terelalisasi.
2. Menentukan tempat pengungsian yang lebih jauh dari puncak Gunung Merapi demi lebih terjaminnya keselamatan masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul.
3. Menggandeng pihak lain, untuk memberikan pelatihan pemulihan psikologi bagi masyarakat khususnya anak-anak. Karena anak-anak merupakan masa yang paling rentan. Pemulihan psikologi akan mempercepat penyembuhan mereka terhadap trauma karena menjadi korban bencana.

4. Regenerasi pengurus Manajemen Bencana. Di tahap ini Pengurus Manajemen Bencana atau Pengurangan Resiko Bencana (PRB) memberikan pelatihan khusus termasuk pengetahuan tentang kebencanaan kepada remaja atau para pemuda yang diharapkan menjadi penerus melaksanakan program PRB. Regenerasi pengurus lebih pada menyiapkan bibit-bibit unggul untuk menggantikan pengurus yang lama sehingga manajemen akan semakin berkembang

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Depdikbud.1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Propinsi Jawa Barat, 2004. *West Java Province Environmental Strategy*: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Bandung: BPLHD
- Rachmat, Agus, 2007. *Manajemen dan Mitigasi Bencana*. (Naskah tidak dipublikasikan)
- Royan, Mochamad. 2004. *Penegembangan Sistem Informasi Gawat Darurat Bencana*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. *Penanggulangan Bencana*. Jakarta
- UNDP.1994. *Program Pelatihan Manajemen Bencana, Mitigasi Bencana*, Edisi Dua, Cambridge Architectural Research Limited

Biodata Penulis

1. **Agung Edi Rustanto, Spd. M.A.** lahir di Purbalingga, 29 Juni 1989 adalah dosen tetap pada Politeknik LP3I Jakarta. Pendidikan S1 Psikologi Pendidikan, dan S2 Ilmu Administrasi (Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI)
2. **Drs. Cicuk Kusmarianto, MPA** adalah dosen Kopertis Wilayah V DPK pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yayasan Notokusumo. Lahir di Blitar, 27 Juli 1960. Jabatan Akademik Lektor. Pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Cendrawasih Irian dan S2 Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM.
3. **Doddy Rahmat Sholihin, SIP. MPA.** adalah dosen tetap yayasan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yayasan Notokusumo. Lahir di Mentok, 25 Desember 1988. Jabatan Akademik Tenaga Pengajar. Pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara di FISIPOL Universitas Gadjahmada dan S2 Manajemen Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara) di FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
4. **Lulu Sayekti, Spi, MPA,** lahir tanggal 13 Oktober 1984 adalah Dosen Tetap Yayasan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN”. Pendidikan S2 Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro Semarang.
5. **Melia Putu, SSos.** adalah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta lulus tahun 2015, lahir di Kulon Progo, 5 Mei 1991
6. **R. Setya Budi Haryono,** lahir di Gunung Kidul, 29 Mei 1968, dengan alamat Gunungsari Ngeposari, Semanu Gunung Kidul. Alumni S1 Ilmu Administrasi Negara STIA “AAN” Yogyakarta , lulus tahun 2015. Bekerja di Balai Bahasa Yogyakarta.
7. **Sri Utami, SIP. MPA.** adalah Dosen Tetap Yayasan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yayasan Notokusumo Yogyakarta. Lahir di Klaten, 19 Mei 1969, pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM, S2 Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM.

8. **Dra. Yenny Dwi Artini, MSi.** Lahir di Yogyakarta, 6 Oktober 1960, adalah staf pengajar Kopertis Wilayah V DPK pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yayasan Notokusumo Yogyakarta. Tahun 1985 meraih gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM dan pada tahun 1998 berhasil mendapatkan gelar Magister Sains (MSi) pada program studi Ilmu Administrasi Negara Program Pasca Sarjana UGM. Saat ini mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Perpajakan dan Public Relations.